



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0024 Tahun 2026

TENTANG

**PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA
PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISITRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0043 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2026, untuk itu perlu dibentuk Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
5. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72033);
6. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 31016);
7. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51027);
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Penanggungjawab Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Para Asisten Sekretaris Kota agar memonitor, mengevaluasi serta melaporkan hasil indikator kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yang menjadi tanggung jawab sesuai bidangnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Para Camat, Para Kabag dan Para Lurah bertanggungjawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan indikator kinerja perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai penanggungjawab untuk memonitor, mengevaluasi penginputan pelaksanaan pencapaian indikator kinerja perjanjian kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur

**PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA
 PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 TAHUN 2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
					I	II	III	IV			
SASARAN STRATEGIS											
1	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Sistem Monev Kinerja	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). METODE PENGUKURAN : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. SUMBER DATA : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei	N/A	4	N/A	4	4	Nilai	1. Asisten Pemerintahan 2. Para Camat 1. Kabag KKPP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
					I	II	III	IV			
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	Sistem Monev Kinerja	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. METODE PENGUKURAN : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektivitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	N/A	4	N/A	4	4	Nilai	1. Para Asisten 2. Kabag Pemerintahan 3. Kabag. Perekonomian 4. Kabag Kesra 3. Kabag KKPP
SASARAN RELEVAN LAINNYA											
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	DASAR HUKUM : a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah DEFINISI : Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing METODE PENGUKURAN : Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei SUMBER DATA : Jaksurvei	N/A	92	N/A	92	92	Nilai	1. Asisten Pemerintahan 5. Kabag Pemerintahan

2. Tercapainya ...

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan				Target Tahunan	Keterangan	Penanggungjawab
					I	II	III	IV			
3	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	DASAR HUKUM : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. DEFINISI : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. Komunikasi dan konsultasi; a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. METODE PENGUKURAN : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : a ≤ 60 = Rendah b > 60 s.d 70 = Cukup c > 70 s.d 90 = Baik d > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 SUMBER DATA : BPKD	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase	1. Asisten Adm. Dan Kesra 1. Kabag PP dan Keu
5	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	DASAR HUKUM : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP DEFINISI : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan. METODE PENGUKURAN : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) SUMBER DATA : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase	1. Asisten Adm. Dan Kesra 1. Kabag PP dan Keu



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 TAHUN 2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
SASARAN STRATEGIS									
1	Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang optimal	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	4	RA1. Menetapkan Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK1.1. Ditetapkannya Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O1.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP
						T/O1.1.2. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	
				RA2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O2.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	
						T/O2.1.2. Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	
				RA3. Melaksanakan Pemantauan Implementasi Tindak Lanjut dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan Implementasi Tindak Lanjut dan Ditetapkannya Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O3.1.1. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW II	
						T/O3.1.2. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW IV	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
		Indeks efektivitas koordinasi kota administrasi	4	RA1. Menetapkan Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK1.1. Ditetapkannya Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O1.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian Pembangunan 3. Asisten Adm. Kesra 4. Kabag Pemerintahan 5. Kabag Perekonomian 6. Kabag Kesra 7. Kabag KKPP
						T/O1.1.2. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	
				RA2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O2.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	
						T/O2.1.2. Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	
				RA3. Melaksanakan Pemantauan Implementasi Tindak Lanjut dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan dan Ditetapkannya Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O3.1.1. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW II	
						T/O3.1.2. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW IV	
				RA 4. Penetapan Program Strategis oleh Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Citra Positif Instansi di Masyarakat	KK 4.1 Ditetapkannya program strategis oleh seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan citra positif instansi di masyarakat	T/O.4.1.1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait dengan Program Strategis oleh Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Citra Positif Instansi di Masyarakat	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag Umum dan Protokol
						T/O.4.1.2. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW II	
						T/O.4.1.3. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW III	
						T/O.4.1.4. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW IV	

Sasaran ...

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
SASARAN RELEVAN LAINNYA									
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	RA1. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	KK1.1. Tersusunnya Surat Tugas Tentang Tim Monitoring dan Evaluasi	T/O1.1.1. Surat Tugas	1 Surat	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag Pemerintahan
				RA2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	KK2.1. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	T/O2.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW I	
						T/O2.1.2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW II	
						T/O2.1.3. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW IV	
3	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA. 1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK. 1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	T/O.1.1.1 Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	1 data	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan
				RA. 2. Menyusun AKB target bulanan dalam sistem sipkddki.jakarta.go.id	KK. 2.1 Tersusunnya AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	T/O.2.1.1 data AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	1 data	TW I	
				RA. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi meliputi capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	KK. 3.1 Tersusunnya monitoring kinerja anggaran meliputi yaitu capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	T/O.3.1.1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW I	
						T/O.3.1.2 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW II	

T/O.3.1.3 Laporan ...

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA 4. Merealisasikan Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	KK. 4.1. Tercapainya Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) paling sedikit 80%	T/O.3.1.3 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan
						T/O.3.1.4 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW IV	
						T/O. 4.1.1. Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ)	80%	TW IV	
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA.1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK.1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O.1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan
						T/O.1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	
						T/O.1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	
						T/O.1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	
					KK.1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O.1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	
						T/O.1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	
						T/O.1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	

KK.1.2.4. Laporan ...

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O.1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
 TAHUN 2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
SASARAN STRATEGIS									
1	Meningkatnya kinerja melalui koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang optimal	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan	4	RA1. Menetapkan Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK1.1. Ditetapkannya Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O1.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag KKPP
						T/O1.1.2. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	
				RA2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O2.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	
						T/O2.1.2. Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	
				RA3. Melaksanakan Pemantauan Implementasi Tindak Lanjut dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan Implementasi Tindak Lanjut dan Ditetapkannya Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	T/O3.1.1. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW II	
						T/O3.1.2. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW IV	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
		Indeks efektivitas koordinasi kota administrasi	4	RA1. Menetapkan Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK1.1. Ditetapkannya Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O1.1.1. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Perekonomian Pembangunan 3. Asisten Adm. Kesra 4. Kabag Pemerintahan 5. Kabag Perekonomian 6. Kabag Kesra 7. Kabag KKPP
						T/O1.1.2. Dokumen Identifikasi Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	
				RA2. Menetapkan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK2.1. Ditetapkannya Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O2.1.1. Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW I	
						T/O2.1.2. Dokumen Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW III	
				RA3. Melaksanakan Pemantauan Implementasi Tindak Lanjut dan Menetapkan Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan dan Ditetapkannya Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	T/O3.1.1. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW II	
						T/O3.1.2. Dokumen Hasil Tindak Lanjut Atas Penyelesaian Permasalahan Hasil Survei Nilai Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi Yang Telah Ditetapkan	1 Dokumen	TW IV	
				RA 4. Penetapan Program Strategis oleh Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Citra Positif Instansi di Masyarakat	KK 4.1 Ditetapkannya program strategis oleh seluruh Perangkat Daerah untuk meningkatkan citra positif instansi di masyarakat	T/O.4.1.1. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait dengan Program Strategis oleh Perangkat Daerah untuk Meningkatkan Citra Positif Instansi di Masyarakat	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag Umum dan Protokol
						T/O.4.1.2. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW II	
						T/O.4.1.3. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW III	
						T/O.4.1.4. Executive Summary/Infografis Program Strategis beserta strategi komunikasi dan implementasinya	1 Dokumen	TW IV	

Sasaran ...

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
SASARAN RELEVAN LAINNYA									
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	RA1. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	KK1.1. Tersusunnya Surat Tugas Tentang Tim Monitoring dan Evaluasi	T/O1.1.1. Surat Tugas	1 Surat	TW I	1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag Pemerintahan
				RA2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	KK2.1. Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	T/O2.1.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW I	
						T/O2.1.2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW II	
						T/O2.1.3. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW III	
						T/O2.1.4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	1 Laporan	TW IV	
3	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA. 1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK. 1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	T/O.1.1.1 Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	1 data	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan
				RA. 2. Menyusun AKB target bulanan dalam sistem sipkddki.jakarta.go.id	KK. 2.1 Tersusunnya AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	T/O.2.1.1 data AKB target bulanan pada sistem sipkddki.jakarta.go.id	1 data	TW I	
				RA. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi meliputi capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	KK. 3.1 Tersusunnya monitoring kinerja anggaran meliputi yaitu capaian keluaran kegiatan/subkegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target.	T/O.3.1.1 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW I	
						T/O.3.1.2 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW II	

T/O.3.1.3 Laporan ...

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA 4. Merealisasikan Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri	KK. 4.1. Tercapainya Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) paling sedikit 80%	T/O.3.1.3 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW III	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan
						T/O.3.1.4 Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi pada 4 variabel	1 Laporan	TW IV	
						T/O. 4.1.1. Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa Bersertifikat TKDN, Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi dari Hasil Produksi Dalam Negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ)	80%	TW IV	
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA.1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK.1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O.1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan
						T/O.1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	
						T/O.1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	
						T/O.1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	
					KK.1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O.1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	
						T/O.1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	
						T/O.1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	

KK.1.2.4. Laporan ...

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O.1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	1. Asisten Administrasi dan Kesra 2. Kabag PP dan Keuangan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002